**KERJASAMA AUSTRALIA – INDONESIA MELALUI PROGRAM MAMPU
UNTUK MENANGANI MASALAH KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI
INDONESIA (STUDI KASUS 2017 – 2020)**

Oleh : Nadine Bertha Dendrobium Sagala

email: nadine.bertha2783@student.unri.ac.id

Pembimbing: Dra. Den Yealta, M.Phil

Bibliografi: 16 Buku, 5 Jurnal, 24 Laman Resmi

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru Pekanbaru

ABSTRACT

Violence against women includes any act of gender-based violence that causes or can result in physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion and arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life. In order to reduce the number of violence against women that occurs in Indonesia, Australia through an assistance program established by DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade) has made a partnership with Indonesia and BAPPENAS. The purpose of this research is to find out the collaboration between Australia and Indonesia through MAMPU Program on dealing with violence against women cases in Indonesia. In this study, researchers used the concept of gender equality which is one of the concepts of human security to analyze the efforts made by MAMPU Program on handling cases of violence against women.

The research method used in this research is qualitative with data collection techniques based on literature study. The data was obtained through the official website of the MAMPU Program, the official website of the Australian Embassy and the official website of the Ministry of National Development Planning/BAPPENAS, and the official website of Komnas Perempuan.

The results of this study indicate that there is an implementation of Australia - Indonesia cooperation through MAMPU Program to handle cases of violence against women in Indonesia (2017 - 2020). As well as progress in access to services at MAMPU Partners, although this has not impact much to reduce the number of violence against women in Indonesia.

Keywords: *MAMPU, Gender Equality, Violence Against Women, Australia-Indonesia Cooperation*

Pendahuluan

Penelitian ini merupakan kajian dalam ilmu hubungan internasional yang membahas tentang kerjasama Australia dan Indonesia melalui program MAMPU untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada studi kasus tahun 2017 - 2020. Australia merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah panjang hubungan bilateral dengan Indonesia. Hubungan Australia - Indonesia telah berkembang dalam segala aspek kerjasama sejak hubungan diplomatik Australia - Indonesia dibuka pada tahun 1949.¹

Program MAMPU merupakan salah satu program kerjasama antara Australia dan Indonesia yang bergerak secara khusus untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Program ini dilaksanakan dalam periode 8 tahun dengan dua fase 4 tahun yaitu pada tahun 2012-2016, dan 2017-2020. Pada penelitian ini fokus membahas program MAMPU fase II di periode 2017-2020. MAMPU dibentuk oleh Pemerintah Australia (DFAT/ The Australian Department of Foreign Affairs and Trade) bersama dengan Pemerintah Indonesia (BAPPENAS).

MAMPU menjangkau perempuan yang terpinggirkan dengan bekerja bersama organisasi masyarakat sipil, Mitra MAMPU, untuk memberdayakan perempuan dan mempengaruhi kebijakan pemerintah di tingkat daerah dan nasional. MAMPU memperkuat kapasitas Mitra, memperluas jaringan dan menghubungkan mereka dengan pemangku kepentingan strategis dan pembuat kebijakan. MAMPU berafiliasi dengan 13 organisasi masyarakat sipil yang memiliki rekam jejak yang baik dalam pengorganisasian masyarakat serta mendukung reformasi kebijakan di Indonesia, dengan jaringan lebih dari 100 organisasi lokal, melaksanakan kegiatan di hampir 1.000 desa di 150 kabupaten/kota di 27 dari 38 provinsi di Indonesia.² MAMPU bertujuan untuk berkontribusi pada tujuan yang lebih luas dalam meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tujuan tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2014 - 2019.

Australia merupakan salah satu negara utama yang mendukung PBB untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Komitmen ini ini dijalankan dalam

¹ Sejarah Hubungan antara Indonesia – Australia , diakses dari <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22458/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

pada 24 Oktober 2022

² MAMPU dalam angka, diakses dari <http://mampu.bappenas.go.id/tentang-kami/> pada 27 oktober 2022

strategi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (Department of Foreign Affairs and Trade Gender Initiatives).³

Fokus kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang akan dibahas dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2017 - 2020. Kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2017 dilaporkan meningkat hingga tahun 2019, sampai akhirnya mengalami penurunan sekitar 31.5% pada tahun 2020. Penurunan jumlah kasus pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya bukan karena kasus kekerasan itu menurun namun karena pandemi Covid19 yang membuat korban dekat dengan pelaku kekerasan. Kasus yang termasuk dalam kategori kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang ditangani bekerjasama dengan Australia dalam program MAMPU adalah dalam konteks segala tindakan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Menurut Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan (KtP) adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan

penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa atau anak perempuan dan remaja.

Secara spesifik kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang ditangani oleh MAMPU dibagi kedalam dua ranah, yakni:

1. Ranah Privat yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), termasuk diantaranya : kekerasan fisik, ekonomi, psikis, dan seksual.
2. Ranah Publik yaitu perkosaan, pencabulan, penganiayaan, dan termasuk didalamnya ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja membatasi kebebasan perempuan.⁴

Kerangka Teori

Perspektif Institusional

Liberalisme

Jackson dan Sorensen membagi teori Liberalisme menjadi empat pemikiran utama; yaitu *Sociological Liberalism*, *Interdependence Liberalism*, *Institutional Liberalism*, dan *Republican Liberalism*.⁵ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Liberalisme institusional. Liberalisme institusional menggaris -

³ Kerjasama Australia – Indonesia melalui Program MAMPU dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia (2014-2018) diakses dari https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1918/13/Unikom_Desi%20Annisa%20Putri_Jurnal.pdf pada 24 Oktober 2022

⁴ Harnoko, B. R. (2010), *Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*. Muwazah, 2(1), 181–188

⁵ Martin Griffiths, *Fifty Key Thinkers in International Relations* (London : Routledge, 1999), Hal 108

bawahinya pentingnya kerjasama yang terorganisir antar negara.

Liberalisme Intitusional menggaris-bawahi pentingnya kerja sama yang terorganisir antar negara. Adanya lembaga-lembaga internasional membuat negara-negara saling bekerja sama yang membantu mengurangi ketidakpercayaan dan ketakutan antar negara dengan saling memberikan informasi diantara negara anggotanya, juga lembaga internasional menyediakan forum untuk negara-negara dapat bernegosiasi.

Peran dari lembaga internasional menurut Liberalisme Institusional adalah pertama, memberikan arus informasi dan peluang untuk bernegosiasi. Kedua, sebagai tempat pemerintah untuk melihat apakah negara lain melaksanakan komitmen seperti yang sudah disepakati. Ketiga, memperkuat kepercayaan yang sudah ada sebelumnya akan soliditas suatu perjanjian internasional. Liberalisme institusional mengemukakan penekanan yang lebih besar pada kekuatan kerja sama melalui bentuk dan prose hukum internasional dan organisasi internasional. Teori liberalisme institusional yang dipakai penulis dalam tulisan ini berfungsi untuk melihat kerjasama antara negara Australia dan Indonesia melalui program MAMPU dalam

menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Teori Diplomasi Publik

Penulis menggunakan Teori Kerjasama Internasional. Sejak awal, fokus dari Hubungan Internasional adalah untuk mempelajari penyebab - penyebab yang menimbulkan adanya kerjasama.

Kerjasama berasal dari suatu komitmen terhadap kesejahteraan bersama atau untuk memenuhi kepentingan pribadi. Isu utama dari teori kerjasama adalah didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang didapat menguntungkan kedua belah pihak melalui kerjasama yang dilakukan, daripada dengan usaha sendiri atau dengan persaingan.⁶

Menurut Holsti, kerjasama atau kolaborasi bermula karena adanya keanekaragaman masalah nasional, regional maupun global yang muncul sehingga diperlukan adanya perhatian lebih dari satu negara, kemudian masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan dengan membawa usul penanggulangan masalah, melakukan tawar-menawar, atau mendiskusikan masalah, menyimpulkan bukti-bukti teknis untuk membenarkan satu usul yang lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau saling

⁶ Dougherty, J. E., & Pfaltzgraff, R. L. (1997). *Contending Theories of International Relation: A Comprehensive*

Survey (4th Edition ed.). New York: Ed Addison Wesley Longman. hal. 418

pengertian yang dapat memuaskan semua pihak.⁷

Tingkat Analisis Negara-Bangsa

Patrick Morgan dan Mochtar Mas' oed menyebutkan 5 tingkat analisis yaitu individu, perilaku kelompok, negara bangsa, pengelompokan negara – negara, dan sistem internasional.⁸ Morgan berpendapat bahwa level analisis mengasumsikan semua pembuatan keputusan apabila dikaitkan dengan kerja sama internasional dalam hal ini adalah Kerjasama internasional Australia dan Indonesia melalui program MAMPU dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan berfokus pada level analisis negara – bangsa karena peneliti perlu mengidentifikasi Kerjasama program MAMPU melalui perilaku negara Australia dan Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif untuk menggambarkan, mencatat, menganalisis, dan menjabarkan masalah yang akan diteliti. Penelitian kualitatif deskriptif memiliki tujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian dengan cara menggambarkan permasalahan menggunakan kata – kata dan angka serta menjawab sebuah persoalan

dengan pertanyaan seperti siapa, kapan, dimana, dan bagaimana.

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan teknik studi pustaka yang berupa buku, jurnal, majalah ilmiah, dokumen dan dari hasil penelitian yang terdahulu. Peneliti juga mengambil data dan berita dari situs-situs informasi terpercaya seperti website resmi Komnas Perempuan, Program MAMPU, Kementerian PPN/Bappenas, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Kedutaan Besar Australia, dan situs-situs lainnya.

Pembahasan

Hubungan Bilateral Australia dan Indonesia

Hangatnya hubungan kedua negara ditunjukkan dengan bukti bahwa Australia mendukung perjuangan rakyat Indonesia untuk pengakuan kedaulatan antara tahun 1945 dan 1949. Dukungan tidak hanya datang dari pemerintah Australia tetapi juga dari masyarakat. Selain menggalang dana untuk mendukung perjuangan rakyat Indonesia, serikat pekerja memboikot 559 pedagang dan kapal perang Belanda yang bersiap membawa kembali pemerintah kolonial Belanda ke Indonesia. Sejak awal, pemerintah Australia berinisiatif mengangkat

⁷ *Ibid*

⁸ Mas' oed, Mochtar. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Yogyakarta : LP3ES, 35-40.

masalah Indonesia di sidang Dewan Keamanan PBB (DK PBB). Selain itu, pemerintah Australia berusaha menginternasionalisasikan masalah Indonesia. Sikap Australia tersebut mendorong para pemimpin kita untuk memilih Australia sebagai anggota ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Commission of Good Offices yang lebih dikenal dengan Commission of Three Nations (CTN). Australia juga merupakan salah satu dari sedikit negara yang mengakui kedaulatan Indonesia. Secara de facto, Australia mengakui kedaulatan Indonesia pada Juli 1947, sedangkan secara de Jure pada bulan Desember 1949.

Program MAMPU merupakan kemitraan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia yang berdiri sejak tahun 2012 dan bekerja untuk meningkatkan akses perempuan miskin ke layanan esensial dan program pemerintah lainnya untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia (RPJMN 2015-2019) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Berdasarkan data Value Champion yang merupakan perusahaan riset Singapura pada tahun 2019, menemukan bahwa Indonesia adalah negara paling berbahaya kedua bagi wanita di kawasan Asia - Pasifik. Hal ini dapat terjadi karena tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sebagaimana

hasil data dalam sebuah studi nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang ditugaskan oleh Kementerian Penguatan Wanita dan Perlindungan Anak menemukan bahwa 1 dari 3 perempuan di Indonesia terlibat kekerasan dalam kehidupan mereka. Pemikiran yang dilakukan oleh Value Champion membuat peringkat negara-negara di kawasan ini sehubungan dengan keamanan, perawatan kesejahteraan dan pembukaan yang dapat diakses oleh perempuan, dengan akreditasi tentang keamanan. Isu ini menjadi salah satu fokus Program MAMPU karena melihat tingkat kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat. Program MAMPU telah menangani korban - korban kekerasan bersama beberapa kemitraan.

Perubahan pengaturan tata kelola pada tahun 2017, di awal Fase II meningkatkan keterlibatan BAPPENAS di MAMPU dan menciptakan ruang baru untuk interaksi antara mitra dan kementerian Pemerintah Indonesia. Nilai khusus adalah pembentukan Kelompok Kerja Tematik yang membawa para mitra ke dalam kontak reguler dengan kementerian - kementerian utama untuk membahas prioritas kebijakan bersama. Sekretariat MAMPU, didirikan dan diawasi oleh Managing Contractor, Cowater International, mendukung kelancaran fungsi tata kelola dan sistem manajemen. Mitra MAMPU bekerja dengan pemerintah untuk

mengembangkan dan menguji model sistem peradilan pidana terpadu dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Kasus Kekerasan Perempuan di Indonesia Tahun 2017 – 2020

Kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2017 dilaporkan meningkat hingga tahun 2019, sampai akhirnya mengalami penurunan sekitar 31.5% pada tahun 2020. Berdasarkan Grafik 2.2.1⁹, penurunan jumlah kasus pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya bukan karena kasus kekerasan itu menurun. Menurut survei yang dilakukan untuk melihat dinamika KtP dimasa pandemik, penurunan jumlah kasus dikarenakan:

1. Korban dekat dengan pelaku selama masa pandemik Covid19
2. Korban memilih untuk mengadu pada keluarga / diam dan tidak melaporkan
3. Layanan pengaduan yang belum beradaptasi dengan kondisi pandemi dalam menggunakan sistem *online*

Sebagian besar data bersumber dari kasus atau perkara yang ditangani oleh :

1. Dari Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama

⁹ Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019> pada 8 Februari 2023

2. dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan.

Kasus kekerasan yang didata dalam catatan tahunan Komnas Perempuan mengklasifikasikan kekerasan terhadap perempuan dalam tiga ranah yaitu:

1. Ranah Personal

Bentuk kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang terjadi dalam hubungan relasi personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal dekat oleh korban misalnya orang yang memiliki hubungan darah, kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban.

Kekerasan pada ranah personal yang tertuang dalam UU PKDRT¹⁰ meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikologi, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi.

2. Ranah Publik/ Komunitas

Pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal. Pada ranah publik ada kategori khusus pekerja migran dan trafiking.¹¹

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020 diakses dari <https://drive.google.com/file/d/1hnuidY1OY>

3. Ranah Negara

Pelaku kekerasan adalah aparaturnegara dalam kapasitas tugas. Termasuk di dalam kasus di ranah negara adalah ketika pada peristiwa kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian namun tidak berupaya untuk menghentikan atau justru membiarkan tindak kekerasan tersebut berlanjut. Kasus kasus di ranah Negara terbagi menjadi dua yaitu *Act Of Commission* - pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen HAM yang dilakukan dengan perbuatannya sendiri. Lalu yang kedua adalah *Act of Omission* (pembiaran-tindakan untuk tidak melakukan apapun) yang berarti pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen HAM

Kekerasan berdasarkan Provinsi yang tertinggi pada tahun 2017 adalah Jawa Timur dengan 2075 kasus, lalu Jawa Tengah dengan 1873 kasus, dan ketiga Sumatera Utara dengan 1035 kasus. Tingginya angka tersebut belum tentu menunjukkan banyaknya kekerasan di Provinsi tersebut melainkan bisa dikarenakan jumlah Lembaga Pengada Layanan yang terbatas di provinsi tersebut serta kualitas dan kapasitas pendokumentasian lembaga.

Kerjasama Australia – Indonesia Melalui Program MAMPU dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Kerjasama bilateral antara Australia dan Indonesia untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia merupakan langkah dan komponen penting untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Australia merupakan satu dari banyak negara yang mendukung PBB untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) adalah program 8 tahun (dengan anggaran \$110,8 juta yang didanai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Pemerintah Australia dengan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan dua fase yang berlangsung selama 8 tahun. MAMPU tahap I (2012 - 2016) terfokus pada perempuan miskin dan organisasi perempuan yang memperjuangkan hak - hak perempuan miskin. Sedangkan MAMPU tahap II (2017 - 2020) fokus untuk meningkatkan perempuan di Indonesia ke administrasi dasar dan program pemerintah lainnya untuk mewujudkan keseimbangan gender. Kedua fase didukung oleh pendekatan strategis yang konsisten. Bercermin pada konteks tahun 2012, MAMPU dirancang sebagai inisiatif jangka

panjang untuk memanfaatkan kapasitas laten gerakan perempuan Indonesia untuk mempengaruhi reformasi pemerintahan. MAMPU memberikan kombinasi hibah, bantuan teknis, dan serangkaian dukungan lainnya kepada jaringan mitra yang bekerja di lima bidang tematis:

1. Meningkatkan akses perempuan ke program perlindungan sosial Pemerintah Indonesia;
2. Meningkatkan kondisi kerja dan menghilangkan diskriminasi di tempat kerja;
3. Meningkatkan kondisi migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri;
4. Meningkatkan kesehatan dan status gizi perempuan; dan mengurangi Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP). MAMPU bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan Indonesia terhadap layanan esensial dan program pemerintah lainnya untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang relevan.

Kedua Fase MAMPU memiliki pendekatan strategis yang sama untuk mempengaruhi reformasi kebijakan dan berdampak positif pada

kehidupan perempuan. MAMPU berusaha untuk mengatasi masalah dimana perempuan masih sulit untuk pengambilan keputusan dalam ranah publik; dan pada akhirnya harus berjuang untuk mengakses layanan pemerintah. Oleh karena itu, struktur tata kelola MAMPU dibagi menjadi tiga tingkatan¹², yaitu :

1. **Komite Pengarah** dengan keanggotaan dari BAPPENAS, diwakili oleh Deputi Menteri Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Masyarakat, dan DFAT, diwakili oleh Penasihat Menteri untuk Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
2. **Komite Teknis** terdiri dari Penasihat yang bertanggung jawab atas pengawasan MAMPU dari DFAT dan Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga BAPPENAS dan bertanggung jawab atas koordinasi langsung.
3. **Sekretariat MAMPU** bertugas mendukung berfungsinya struktur secara keseluruhan.

Hambatan MAMPU Tahun 2017 – 2020

Tantangan yang harus dihadapi para mitra, dengan dukungan MAMPU, adalah meningkatkan implementasi kebijakan. Selama kuartal pertama 2017, MAMPU bekerja sama dengan para mitra dan

¹² *MAMPU Phase 2 Independent Strategic Review*, diakses dari <https://www.dfat.gov.au/about->

[us/publications/Pages/indonesia-mampu-monitoring-evaluation-plan-2019](https://publications/Pages/indonesia-mampu-monitoring-evaluation-plan-2019) pada 8 maret 2023

perwakilan pemerintah untuk menyusun draft peta jalan tahunan selama tiga tahun dari 2017 hingga 2019. Draft tersebut kemudian disempurnakan lebih lanjut setiap tahun selama proses perencanaan kerja tahunan. Meskipun MAMPU diselenggarakan di sekitar lima bidang tematik, serangkaian prioritas kolektif yang lebih luas terus menjadi semakin penting selama Fase II. Menjelang akhir tahun 2018 MAMPU mendukung para mitra untuk menangani enam poin agenda aksi bersama bersama lima bidang tematik yang berbeda. Agenda kolektif yang lebih luas ini yang mencakup SDGs, pernikahan anak dan intoleransi – bersinggungan tetapi juga melampaui area tematik. Hal ini menimbulkan kekacauan dalam arsitektur konseptual MAMPU.

Pada tahun 2019 MAMPU mengambil kesempatan untuk melakukan reorganisasi jelang tahun terakhir. Pada pertengahan 2019, DFAT telah menginformasikan kepada MAMPU tentang kemungkinan perpanjangan 6 bulan untuk memberikan waktu bagi pengembangan inisiatif baru. Karena keterbatasan sumber daya, disepakati bahwa MAMPU akan fokus menjaga momentum untuk pengaruh kolektif terhadap kebijakan selama masa perpanjangan. Untuk memberikan fokus yang cukup pada pekerjaan ini, MAMPU mengidentifikasi empat

‘cluster’ (atau area kebijakan) Keempat klaster itu adalah:

- (1) Pekerjaan Layak dan Pemberdayaan Ekonomi;
- (2) Pelayanan Sosial Dasar
- (3) Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan;
- (4) Klaster 'silang' yang menggabungkan pencegahan perkawinan anak, menangani intoleransi dan bekerja dengan anggota parlemen.¹³

Pencapaian MAMPU Tahun 2017 – 2020

Januari 2017 hingga Agustus 2020, kelompok perempuan berhasil mendorong 315 keputusan kebijakan oleh pemerintah desa. Peningkatan ini terjadi di 72 dari 147 kabupaten tempat mitra bekerja. Kebijakan ini bertujuan untuk menangani masalah perlindungan sosial, diikuti oleh KtP, kesehatan reproduksi dan seksual perempuan, pekerja migran perempuan, dan pekerja rumahan. Mitra MAMPU menekankan pentingnya kapasitas perempuan untuk berperan aktif dalam mengatasi kesenjangan dalam sistem penargetan resmi di tingkat desa, khususnya terkait jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin (PBI JKN).

Sejak Januari 2017 Mitra telah berkontribusi dalam 302 keputusan kebijakan di 80 kabupaten – 60% dari wilayah cakupan MAMPU dan sekitar 15% dari seluruh kabupaten di Indonesia.¹⁴ Saat ini, di kabupaten

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

terdapat kerangka kebijakan dan peraturan yang lebih kuat yang mengatur penyediaan layanan bagi korban dan penyintas kekerasan. Misalnya pada Desember 2019 Bupati Muna, Sulawesi Tenggara, mengumumkan Peraturan Daerah baru tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Peraturan baru yang memperluas layanan yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (P2TP2A) disahkan oleh DPRD setelah kampanye advokasi selama 3 bulan yang melibatkan anggota FPL Lambu Ina dan CSO lokal lainnya. MAMPU telah menyempurnakan kebijakan Kekerasan Terhadap Perempuan di daerah-daerah di luar Jawa seperti Bali, Bengkulu, Sumatera Utara, Jambi, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur. Sebelum intervensi MAMPU, wilayah - wilayah ini memiliki kerangka kebijakan yang sangat terbatas untuk layanan penanganan KtP.

Antara tahun 2018 dan 2020, kepala desa di 10 lokasi di Aceh, Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur menandatangani Penyediaan Layanan Berbasis Komunitas yang merupakan sistem relawan yang dilatih oleh mitra untuk membantu pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Pengakuan formal terhadap kelompok perempuan juga menjadi dasar hukum untuk meminta alokasi dari anggaran desa. Pendekatan MAMPU dalam mendukung

perempuan untuk berorganisasi dan berperan aktif dalam penyediaan layanan berkontribusi dalam meningkatkan penyerapan beberapa jenis layanan. Membandingkan perubahan akses pada sampel rumah tangga miskin di lokasi MAMPU dan non-MAMPU, menunjukkan bahwa strategi ini berkontribusi untuk meningkatkan akses dan penggunaan skrining serviks (tes IVA dan Pap smear) dan kanker payudara. Dalam kasus ini, berpartisipasi dalam kelompok-kelompok lokal meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang bentuk-bentuk kanker ini di antara rumah tangga miskin, meningkatkan kemungkinan kehadiran di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) setempat. Keberadaan kelompok perempuan di 106 desa yang didukung oleh 'Aisyiyah dan PERMAMPU menunjukkan bahwa layanan kanker serviks akan terus meningkat di masa mendatang. Ini akan menguntungkan sebagian besar dari 280.000 perempuan yang tinggal di desa-desa tersebut.¹⁵

Bukti yang menunjukkan bahwa intervensi MAMPU berbasis desa membantu meningkatkan kemungkinan perempuan melaporkan kasus KtP. Rendahnya tingkat pelaporan KtP umumnya diakui sebagai tantangan yang kompleks, yang mencerminkan norma sosial yang tersebar luas, dan kurangnya saluran yang tersedia bagi perempuan. Terlepas dari kesulitan-

¹⁵ *Ibid*

kesulitan ini, terdapat bukti bahwa perempuan miskin lebih cenderung melaporkan kasus kepada pihak berwenang di desa MAMPU daripada di lokasi non-MAMPU. Partisipasi dalam kelompok lokal, kehadiran paralegal terlatih, dan kedekatan hubungan dengan kader desa dari mitra, menjadi beberapa faktor yang ditemukan mendorong perempuan untuk mengakses bantuan di tingkat lokal. Keberadaan kelompok-kelompok ini di 189 desa di seluruh Indonesia akan terus memberikan manfaat bagi 1,3 juta perempuan yang tinggal di wilayah tersebut. Mengingat bahwa 1 dari 3 perempuan di Indonesia telah mengalami beberapa bentuk kekerasan dan tingkat pelaporan tetap rendah; ini merupakan kemajuan yang sangat relevan.

Simpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana implementasi Kerjasama Australia-Indonesia melalui Program MAMPU dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Program MAMPU telah memberikan banyak dukungan untuk meningkatkan akses layanan pemerintah. Bentuk - bentuk dukungan MAMPU yaitu berupa keputusan kebijakan, menyediakan layanan berbasis komunitas, akses layanan program perlindungan sosial bagi korban kekerasan hingga akses layanan kesehatan reproduksi seperti pemeriksaan kanker serviks (IVA dan

Pap Smear) dan skrining payudara. Upaya - upaya lain yang dilakukan oleh Mitra MAMPU adalah membentuk kelompok perempuan, melatih perempuan dalam penjangkauan dan pengorganisasian masyarakat, melakukan advokasi dan kampanye publik, menyediakan penanganan kasus, serta pengumpulan data untuk mengadvokasi perlindungan hukum yang lebih kuat.

Dalam kurun tahun 2017 hingga 2020, dalam pelaksanaannya Program MAMPU mengalami beberapa kendala. Kendala-kendala yang menghambat kinerja Mitra MAMPU dalam mengembangkan layanan pun bermacam-macam, yaitu desentralisasi di Indonesia yang memberi tantangan bagi organisasi perempuan dan kesetaraan gender karena belum tentu menerima anggaran yang memadai di tingkat daerah untuk diimplementasikan, perbedaan persepsi antara MAMPU dengan Mitra, adanya penolakan dari kelompok lain, kurangnya akses layanan dan pengaduan, serta kendala dalam penanganan kasus. Dengan upaya - upaya penanganan kasus yang telah dilakukan Mitra MAMPU, dapat dikatakan ada perkembangan dalam akses layanan namun belum pada tahap yang maksimal karena berdasarkan data mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang setiap tahunnya dicatat oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan

terhadap perempuan di Indonesia masih terus meningkat.

Daftar Pustaka

Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020 diakses dari

https://drive.google.com/file/d/1hnuidY1OYJN_8y_1Cy3F3z_Gi8z3nh9XW/view pada 8 Februari 2023.

Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun diakses dari

<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019> pada 8 Februari 2023.

Dougherty, J. E., & Pfaltzgraff, R. L. (1997). *Contending Theories of International Relation: A Comprehensive Survey (4th Edition ed.)*. New York: Ed Addison Wesley Longman.

Harnoko, B. R. (2010), *Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*. *Muwazah*, 2(1), 181–188

Kerjasama Australia – Indonesia melalui Program MAMPU dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia (2014-2018) diakses dari https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1918/13/Unikom_Desi%20Annisa%20Putri_Jurnal.pdf pada 24 Oktober 2022.

MAMPU dalam angka, diakses dari <http://mampu.bappenas.go.id/te>

[ntang-kami/](#) pada 27 oktober 2022

MAMPU Phase 2 Independent Strategic Review, diakses dari <https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/indonesia-mampu-monitoring-evaluation-plan-2019> pada 8 maret 2023.

Martin Griffiths, *Fifty Key Thinkers in International Relations* (London : Routledge, 1999).

Mas'oeed, Mochtar. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Yogyakarta : LP3ES, 35-40.

Sejarah Hubungan antara Indonesia – Australia , diakses dari <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22458/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=7&isAllowed=y> pada 24 Oktober 2022